



Berkas Kasus Korupsi Pepadu Dikembalikan Jaksa

Negara (Bali Post) -

Berkas kasus Pepadu (Pengembangan Pertanian Terpadu) yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana dua pekan lalu, Selasa (14/3) kemarin dikembalikan ke Polres Jembrana. Berkas kasus yang ditangani Unit Tipikor (Tindak Pindana Korupsi), Sat Reskrim Polres Jembrana tahap I dengan tersangka rekanan pengadaan sapi, KRA (55) itu mendapat sejumlah catatan yang harus diperbaiki.

Kasi Pidsus Kejari Jembrana Made Pasek Bu-

diawan saat dikonfirmasi kemarin membenarkan hal tersebut. Dari hasil pemeriksaan berkas, ada sejumlah keterangan saksi-saksi yang diperiksa sebelumnya belum detail. Di antaranya dari keterangan saksi di kelompok. Dari lima kelompok, cukup tiga atau dua orang anggota untuk melengkapi keterangan. Selanjutnya, keterangan saksi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan serta keterangan saksi ahli yang memberi bantuan perlu ada pendalaman secara detail.

Jaksa juga memberikan

petunjuk untuk menghadirkan saksi ahli untuk tersangka. Sebab, tersangka juga memiliki hak ingkar dari kasus dugaan korupsi. Kasus ini terkait pengadaan sapi betina dalam program pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis organik tahun 2013. Tersangka merupakan pelaksana pemenang tender CV DKR. Dari hasil penghitungan, kerugian negara akibat korupsi ini sekitar Rp 80 juta.

Tersangka sebagai pemenang tender pengadaan 100 ekor sapi betina menyerahkan pada masing-masing

Gapoktan penerima bantuan Rp 94 juta. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap sapi yang diterima masing-masing Gapoktan oleh tim ahli, 30 ekor sapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan sehingga menimbulkan kerugian Rp 82.585.000.

Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kmb26)

Edisi : Rabu, 15 Maret 2017

Hal : 12



Dua Jembatan di Seraya Dialokasikan Rp 2 Miliar

Amlapura (Bali Post) -

Masyarakat di daerah Seraya, Kecamatan Karangasem boleh berbahagia karena usulan pembangunan jembatan di badan jalan pelintas air itu mendapat lampu hijau dari Pemprov Bali. Bahkan, pemprov sudah mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar untuk membangun dua jembatan di sana. Salah satunya di pelintas air Sungai Tukad Tibu Dalem yang beberapa bulan lalu menelan korban jiwa.

"Masing-masing diplot Rp 1 miliar. Satu untuk di Tukad Tibu Dalem, satu untuk pelintas Tukad Yeh Banges," terang Kadis PU Karangasem, I Ketut Sedana Merta, Selasa (14/3) kemarin.

Pembangunan kedua jembatan, itu rencananya direalisasikan tahun 2017 ini. Kedua jembatan itu, kata Sedana Merta, menjadi prioritas penanganan. Alasannya, di tempat itu selalu berpotensi menimbulkan malapetaka utamanya ketika memasuki musim hujan.

Di wilayah Seraya itu setidaknya ada tiga pelintas air yang perlu dibuatkan jembatan. Semuanya berada di Desa Seraya Tengah, satu yang masih tercecer yakni Tukad Perit. "Tahun ini, perencanaannya dua dulu. Nanti semuanya dikerjakan provinsi. Kita terima sudah jadi," kata Sedana Merta.

Kabid Bina Marga Dinas PU Bali Gede Kardiasa, Sabtu (11/2) kemarin, mengatakan usulan Pemkab Karangasem menyangkut kondisi ruas jalan provinsi di Seraya sudah masuk. Tim dari Bina Marga juga sudah turun ke lokasi melakukan kajian teknis. Dari kajian teknis yang dilakukan, idealnya diakui jembatan itu dibuat sekaligus di tiga titik pelintas air itu. Namun, untuk sementara perencanaan jembatan baru dua titik saja yakni pelintas Tukad Banges dan pelintas Tukad Tibu Dalem. Kedua titik pelintas itu dinilai paling urgen dilihat dari debit airnya saat musim hujan.

Seperti diketahui, 23 Januari lalu, seorang guru SMPN 6 Karangasem di Seraya Timur, tewas karena nekat melintas di pelintas sungai Tukad Tibu Dalem ketika ada air bah. Tiga tahun lalu pernah ada kejadian serupa di pelintas Tukad Yeh Banges. Air bah itu menyeret dan menewaskan seorang siswa SMP. Dua peristiwa nahas itu terjadi karena ruas jalan yang memiliki sedikitnya lima pelintas sungai itu merupakan satu-satunya akses jalan yang ada. Ruas jalan tersebut mempunyai fungsi sangat vital sebagai jalur ekonomi Jasri-Amed.

Sedana Merta menambahkan, Pemkab Karangasem juga mengajukan usulan serupa untuk pelintas air Sungai Tukad Ling di Desa Tianyar Timur, Kubu. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, pelintas air ruas jalan Amlapura-Singaraja itu membawa banjir bandang. Banjir bandang itu merusakkan banyak fasilitas umum serta permukiman warga. (kmb)

Edisi : Rabu, 15 Maret 2017

Hal : 13



Imbas PHR Tak Lagi Lewat Provinsi

Defisit APBD Bali 2017

Makin Membengkak

Denpasar (Bali Post) -

Defisit APBD Provinsi Bali 2017 dipastikan semakin membengkak. Menyusul, Pemprov Bali yang akhirnya merelakan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) disetorkan langsung oleh Kabupaten Badung ke enam kabupaten penerima. Padahal Pemprov telanjur menganggarkan PHR dalam APBD sebesar Rp 53 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda di Denpasar, Selasa (14/3) kemarin, mengatakan defisit yang dirancang

dalam APBD 2017 Rp 505 miliar rencananya ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2016. Namun, Silpa yang tercapai hanya sebesar Rp 169 miliar. Akibatnya, ada potensi defisit sebesar Rp 335 miliar. Potensi defisit ini tentu saja semakin membengkak dengan kebijakan PHR yang tidak lagi disalurkan lewat provinsi.

"Defisit Rp 335 miliar lebih ditambah Rp 53 miliar sehingga bertambah kurang lebih Rp 389 miliar defisitnya," ujarnya. Sebelum terimbas PHR, lanjut Arda, potensi defisit ini juga muncul karena dana alokasi umum

(DAU) yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai. Mengingat, provinsi kini mengambil alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota dan memiliki kewajiban menggaji 6.000 lebih guru PNS. Sesuai hitung-hitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, DAU yang diberikan idealnya minimal Rp 1,5 triliun.

"Tapi tahun ini hanya diberikan pagu DAU Rp 1,234 triliun sehingga ada kekurangan sekitar Rp 288 miliar lebih. Apa sih dasar penghitungan pusat, kok tiba-tiba diberikan Bali segini. Di lain pihak, dengan alih kewenan-

gan SMA/SMK, kabupaten itu relatif tidak berubah, malah ada yang naik," sesalnya.

Arda menambahkan, DAU sementara ini memang masih diberikan Rp 102,873 miliar per bulan. Namun kemungkinan hanya sampai dengan bulan Juni saja. Sebab kabarnya, untuk semester berikutnya DAU dibayar tidak seperti ini tapi tergantung dari penerimaan negara. Artinya, ada potensi jumlah DAU berkurang bila penerimaan negara tidak mencapai target.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menga-

takan mulai 2017 ini memang ada pemikiran dari Kabupaten Badung untuk tidak lagi membagikan PHR melalui pemerintah provinsi sesuai kesepakatan yang dibuat sejak 2009. Padahal, pihaknya sudah kadung menganggarkan Rp 53 miliar atau 20 persen dari penyisihan dana PHR Kabupaten Badung yang dapat dikelola oleh provinsi untuk kegiatan promosi pariwisata dan keamanan. Sementara 80 persen PHR Badung dibagikan untuk enam kabupaten yakni Buleleng, Jembrana, Tabanan, Klungkung, Karangasem, dan Bangli. (kmb32)

Edisi : Rabu, 15 Maret 2017

Hal : 7